

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan hal penting dalam sistem pengendalian manajemen organisasi, baik itu organisasi pemerintah ataupun organisasi swasta. Menurut Munandar (2000) suatu rencana keuangan dibuat secara cermat dan tepat yang dinyatakan dalam nilai rupiah atau unit untuk periode atau jangka waktu tertentu.

Anggaran pemerintahan yang disusun akan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan program-program yang akan dilaksanakan, serta akan digunakan sebagai alat bantu pemerintahan dalam mengalokasikan sumber daya dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan pemerintahan baik itu pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan atau penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya perubahan UU otonomi daerah menyebabkan perubahan pada prosedur penyusunan anggaran APBD. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan untuk menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa perubahan yang dimaksud yaitu adanya peningkatan keterlibatan berbagai pihak yang ada pada pemerintahan daerah dalam proses penyusunan anggaran daerah.

Namun dengan meningkatnya keterlibatan berbagai pihak tersebut, dapat memicu timbulnya *budgetary slack* (senjangan anggaran). Sejumlah kecil *slack* atau kesenjangan diperlukan karena mengurangi sebagian tekanan, tetapi *slack* atau kesenjangan yang berlebihan jelas merugikan kepentingan organisasi (Lubis, 2010). *Slack* yang berlebih dalam anggaran bisa dianggap sebagai tindakan penggelembungan dana, yang pada akhirnya dapat merugikan.

Lestara dkk (2016) menjelaskan bahwa pelaksana anggaran melakukan *budgetary slack*, dikarenakan selisih antara anggaran dengan realisasinya akan menjadi indikator di dalam mengukur keberhasilan dan kinerjanya. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksana anggaran akan cenderung menyusun anggaran yang tidak sesuai harapan dengan tujuan untuk memperoleh insentif yang lebih (Ardinasari, 2017).

Menurut Widanaputra dan Mimba (2014) *budgetary slack* dapat juga terjadi sebagai akibat dari penyembunyian kemampuan nyata, dalam hal ini dapat dilihat dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari realisasi pendapatan yang lebih besar daripada anggaran yang telah dianggarkan ataupun dari kurang maksimalnya penyerapan anggaran belanja daerah. Dilansir dari (www.surabayapagi.com) diketahui Silpa Kabupaten Magetan pada tahun 2013 mencapai Rp 136.670.642.799,15 sedangkan Silpa tahun 2014 mencapai Rp 223.224.008.480,84 naik sebesar 63,3%. Tingginya Silpa merupakan bentuk ketidakmampuan SKPD dalam

penyerapan anggaran, akibat buruknya perencanaan diawal penganggaran kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Magetan.

Budgetary slack yang terjadi di organisasi pemerintah akan mengakibatkan alokasi sumber daya kurang maksimal. Alokasi yang kurang maksimal atau optimal tersebut dapat menurunkan efisiensi dalam suatu organisasi (Kusniawati dan Lahaya, 2017). *Budgetary slack* yang terjadi harus ditangani oleh semua aspek yang ada dan diperlukannya kaji ulang terhadap penyebab atau pemicu timbulnya *budgetary slack*.

Salah satu penyebab atau pemicu terjadinya *budgetary slack* adalah penekanan anggaran. Menurut Sundari (2015) jika anggaran yang disusun dijadikan sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam penilaian kinerja, maka hal itu disebut dengan penekanan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Lestara dkk (2014), Permanasari (2014), Savitri & Sawitri (2014), Putra dkk (2015), serta Nopriyanti (2016) menjelaskan bahwa timbulnya *budgetary slack* pada SKPD dipengaruhi oleh penekanan anggaran. Adanya penekanan anggaran dalam penyusunan anggaran organisasi, menyebabkan bawahan hanya akan mementingkan atau mengutamakan cara agar kinerja mereka terlihat bagus oleh atasan dan tidak lagi mementingkan bagaimana mencapai target anggaran dalam organisasi. Penekanan anggaran pada akhirnya akan mendorong atau memotivasi pegawai untuk melakukan tindakan *budgetary slack* dengan tujuan agar anggaran mudah dicapai dan penilaian yang bagus atas kinerjanya dalam pencapaian target anggaran tersebut.

Adanya informasi asimetri dalam penyusunan anggaran juga dapat memicu terjadinya *budgetary slack*. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestara (2014), Savitri & Sawitri (2014), Putra dkk (2015) yang mengatakan bahwa dengan adanya informasi asimetri ini dapat memicu terjadinya *budgetary slack* pada SKPD. Adanya informasi asimetri sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ikut terlibat dalam penyusunan anggaran dengan tidak memberikan seluruh informasi dan menyusun anggaran yang lebih mudah untuk dicapai, yang pada akhirnya akan merugikan organisasi.

Atasan harus aktif terlibat dalam penyusunan anggaran, karena bawahan sering kali menyusun anggaran dengan semaunya atau dengan kata lain bawahan akan melakukan *budgetary slack* jika tanpa pengawasan aktif dari atasan (Nopriyanti, 2016). Hal ini dapat diartikan bahwa partisipasi anggaran sering dihubungkan dengan timbulnya *budgetary slack*.

Mengacu pada penelitian yang terdahulu, dalam penelitian ini peneliti akan memasukkan variabel lain yaitu *locus of control* sebagai variabel moderating. Alasan dipilihnya variabel *locus of control* sebagai variabel moderating adalah karena terkait dengan kecenderungan terjadinya *budgetary slack*, peningkatan kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor keadaan dan diri sendiri seperti *locus of control* (Falikhatun, 2003 dalam Desmayani dan Suardikha, 2016). *Locus of control* adalah suatu keadaan psikologis pada diri seseorang dalam memandang atau melihat kejadian yang terjadi pada dirinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati (2015) menjelaskan bahwa *locus of control* dapat memoderasi hubungan antara variabel partisipasi anggaran dan variabel *budgetary slack* pada SKPD. Berdasarkan penelitian Nurhidayati (2015) tersebut, peneliti akan menambahkan variabel independen lain yaitu penekanan anggaran dan informasi asimetri.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk menguji lebih dalam tentang pengaruh penekanan anggaran, informasi asimetri dan partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* di SKPD Kabupaten Magetan dengan menggunakan variabel moderating yaitu *locus of control*. Dari hal tersebut diatas, peneliti mengambil judul yaitu **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Budgetary Slack Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh penekanan anggaran terhadap *budgetary slack* pada SKPD Kabupaten Magetan ?
- b. Bagaimana pengaruh informasi asimetri terhadap *budgetary slack* pada SKPD Kabupaten Magetan ?

- c. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* pada SKPD Kabupaten Magetan?
- d. Bagaimana *locus of control* dalam memoderating pengaruh penekanan anggaran, informasi asimetri, dan partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* pada SKPD Kabupaten Magetan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh penekanan anggaran terhadap *budgetary slack* pada SKPD Kabupaten Magetan
- b. Untuk mengetahui pengaruh informasi asimetri terhadap *budgetary slack* pada SKPD Kabupaten Magetan
- c. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* pada SKPD Kabupaten Magetan
- d. Untuk mengetahui *locus of control* dalam memoderating pengaruh penekanan anggaran, informasi asimetri dan partisipasi anggaran terhadap *budgetary slack* pada SKPD Kabupaten Magetan

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Universitas

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah referensi lagi bagi jurusan akuntansi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh

khalayak umum mahasiswa, dosen dan segenap lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Pihak yang terkait atau organisasi sektor publik

Hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu dalam penerapan sistem anggaran efektif dan efisien. Serta dapat membantu dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan timbulnya *budgetary slack* dalam pemerintahan daerah.

c. Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta dapat mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan penekanan anggaran, informasi asimetri, partisipasi anggaran serta *locus of control* dan *budgetary slack*. Peneliti akan selalu berupaya menambah pengetahuan dan keterampilan serta memantapkan sikap dan perilaku dalam berkarya dan bermasyarakat.

d. Penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi dan pembandingan dalam penelitian yang akan dilakukan.